

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pertumbuhan Ekonomi

1. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Secara singkat, pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Dalam pengertian itu terdapat tiga aspek yang perlu digaris bawahi, yaitu proses output perkapita, dan jangka panjang. Pertumbuhan sebagai proses, berarti bahwa pertumbuhan ekonomi bukan gambaran perekonomian pada suatu saat. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan output perkapita, berarti harus memperhatikan dua hal, yaitu output total (GDP) dan jumlah penduduk, karena output perkapita adalah output total dibagi jumlah penduduk. Aspek jangka panjang mengandung arti bahwa kenaikan output perkapita harus dilihat dalam kurun waktu yang cukup lama (10, 20, atau 50 tahun bahkan bisa lebih lama lagi). Kenaikan output perkapita dalam satu atau dua tahun kemudian diikuti penurunan bukan pertumbuhan ekonomi. Teori

pertumbuhan ekonomi pada dasarnya adalah suatu “*ceritera*” logis mengenai bagaimana proses pertumbuhan terjadi. Teori ini menjelaskan dua hal yaitu, 1. Mengenai faktor-faktor apa yang menentukan kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. 2. Mengenai bagaimana faktor-faktor tersebut berintraksi satu sama lain sehingga terjadi proses pertumbuhan.¹

Prestasi ekonomi suatu bangsa atau negara dapat dinilai dengan berbagai ukuran agregat. Secara umum, prestasi tersebut diukur melalui sebuah besaran dengan istilah Pendapatan Nasional. Meskipun bukan merupakan satu-satunya ukuran untuk menilai prestasi ekonomi suatu bangsa, ia cukup representatif dan sangat lazim digunakan. Pendapatan nasional bukan hanya berguna untuk menilai perkembangan ekonomi suatu negara dari waktu ke waktu, tapi juga membandingkannya dengan negara lain. Rinciannya secara sektoral dapat menerangkan struktur perekonomian negara yang bersangkutan. Di samping itu, dari angka pendapatan Nasional selanjutnya dapat pula diperoleh

¹ Julius R. Latumaerissa.”*Perekonomian Indonesia dan Dinamika Ekonomi Global*”, Jakarta; Mitra Wacana Media. 2015. 23

ukuran turunan (*derived measures*)-nya seperti pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita².

Prof. Simon Kuznets dalam kuliahnya pada peringatan Nobel mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai “kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya; kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukannya. Definisi ini mempunyai tiga komponen: pertama, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terlihat dari meningkatnya secara terus menerus persediaan barang; kedua, teknologi maju merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat pertumbuhan kemampuan dalam menyediakan aneka macam barang kepada penduduk; ketiga, penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan adanya penyesuaian dibidang kelembagaan dan ideologi sehingga inovasi yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan umat manusia dapat dimanfaatkan secara tepat. Teknologi modern misalnya, tidak

² Dumairy, *perekonomian indonesia*, (jakarta; erlangga 1996), Hal. 37

cocok dengan corak atau kehidupan desa, pola keluarga besar, usaha keluarga, dan buta huruf. Pertumbuhan ekonomi menurut Schumpeter adalah perubahan jangka panjang secara perlahan dan mantap yang terjadi melalui kenaikan tabungan dan penduduk.³

Proses pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua macam faktor, faktor ekonomi dan nonekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu negara tergantung pada sumber alamnya, sumber daya manusia modal, usaha, teknologi, dan sebagainya. Semua itu merupakan faktor ekonomi. Tetapi pertumbuhan ekonomi tidak mungkin terjadi selama lembaga sosial, kondisi politik, dan nilai-nilai moral dalam suatu bangsa tidak menunjang. Didalam pertumbuhan ekonomi, lembaga sosial, sikap budaya, nilai moral, kondisi politik, dan kelembagaan merupakan faktor non ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi telah menjadi jalan hidup bangsa dari masing-masing negara. Pemerintah dapat jatuh atau kuat berdiri tergantung pada rendah atau tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi negaranya, yang diukur berdasarkan peringkat nilai

³ Jhingan, Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan (Jakarta; Rajawali 2016). Hal 57

tertentu yang ditetapkan oleh standar ukuran dunia. Seperti telah kita lihat, program pembangunan negara-negara dunia ketiga seringkali dinilai berdasarkan tingkat pertumbuhan produksi dan pendapatan nasionalnya. Dalam kenyataannya, selama bertahun-tahun kebijakan ekonomi yang konvensional menyamakan “pembangunan” dengan kecepatan total tingkat pertumbuhan dalam produksi.⁴

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama atau suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Jumlah penduduk bertambah setiap tahun, sehingga dengan sendirinya kebutuhan konsumsi sehari-hari juga bertambah setiap tahun, maka dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahun.

2. Teori – Teori Pertumbuhan Ekonomi

a. Teori klasik

Teori klasik adalah pembangunan ekonomi yang dilandasi oleh sistem liberal, yang mana pertumbuhan ekonomi dipacu oleh

⁴ Michael Todaro, *Ekonomi Untuk Negara-Negara Berkembang*, (Jakarta; Bumi Aksara), hal. 153

semangat untuk mendapatkan keuntungan maksimal. Jika keuntungan meningkat, tabungan akan meningkat, dan investasi juga akan bertambah.

Menurut pemikiran klasik, pada kondisi seperti ini perekonomian mengalami tingkat kejenuhan atau keadaan stasioner. Ini adalah sebuah keadaan dimana perekonomian telah dewasa, mapan dan masyarakat telah sejahtera, tetapi tanpa perkembangan lebih lanjut. Beberapa teori klasik tersebut antara lain sebagai berikut.

1. Teori Pertumbuhan Adam Smith

Menurut teori ini, ada tiga faktor penentu proses produksi/pertumbuhan yaitu SDA, SDM, dan barang modal.

2. Teori pertumbuhan David Ricardo

Menurut teori ini, pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh SDA (dalam arti tanah) yang terbatas jumlahnya, dan jumlah penduduk yang menghasilkan jumlah tenaga kerja yang menyesuaikan diri dengan tingkat upah, di atas atau di bawah tingkat upah alamiah (atau minimal). David Ricardo juga melihat adanya perubahan teknologi yang selalu terjadi, yang

membuat meningkatnya produktivitas tenaga kerja dan memperlambat proses *diminishing return* kemerosotan tingkat upah dan keuntungan ke arah tingkat minimumnya. David Ricardo juga melihat pertanian sebagai sektor utama sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi.

3. Teori Pertumbuhan dari Thomas Robert Malthus

Menurutnya, ukuran keberhasilan pembangunan suatu perekonomian adalah kesejahteraan negara, yaitu jika PNB potensialnya meningkat. Sektor yang dominan adalah pertanian dan industri. Jika *output* di kedua sektor tersebut ditingkatkan, maka PNB potensialnya akan bisa ditingkatkan. Ada dua kelompok faktor yang sangat menentukan pertumbuhan, yaitu faktor-faktor ekonomi seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan organisasi. Dan faktor-faktor non-ekonomi seperti keamanan atas kekayaan, konsistensi dan hukum yang pasti, etos kerja dan disiplin pekerja yang tinggi⁵.

⁵ Tulus T.H Tambunan. Perekonomian Indonesia. Hal. 41

b. Teori pertumbuhan Neo Klasik

Teori ini merupakan pengembangan dari teori klasik sebelumnya. Fokus pembahasan Neo Klasik lebih ditekankan kepada akumulasi stok barang modal dan keterkaitannya dengan keputusan masyarakat untuk menabung atau melakukan investasi.

Asumsi-asumsi yang mendasariteori Neo Klasik terdiri dari:

1. Teknologi dianggap konstan.
2. Tingkat depresiasi dianggap konstan.
3. Tidak ada perdagangan luar negeri.
4. Tidak ada pengeluaran pemerintah, Pertambahan penduduk/tenaga kerja dianggap tetap.
5. Seluruh penduduk dianggap bekerja, artinya jumlah penduduk = jumlah tenaga kerja.

Dengan asumsi-asumsi tersebut, Neo Klasik menyimpulkan bahwa faktor penentu pertumbuhan ekonomi hanya terletak pada variabel stok barang modal (K) dan tenaga kerja (L).

c. Teori pertumbuhan Schumpeter

Schumpeter berpandangan bahwa pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh kemampuan kewirausahawanan. Sebab para pengusaha yang mempunyai kemampuan dan keberanian dalam menciptakan inovasi-inovasi baru. Termasuk dalam inovasi adalah penyusunan tahap produksi serta masalah organisasi manajemen, agar produksi yang dihasilkan dapat diterima dipasaran⁶.

3. Sumber-Sumber Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi bisa bersumber dari pertumbuhan permintaan agregat atau pertumbuhan penawaran agregat. Dari sisi permintaan agregat, peningkatannya di dalam ekonomi bisa terjadi karena PN, yang terdiri atas permintaan masyarakat (konsumen), perusahaan, dan pemerintah, meningkat. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, sisi permintaan agregat (penggunaan PDB) terdiri atas empat komponen: konsumsi rumah tangga, investasi, konsumsi/pengeluaran pemerintah, dan ekspor netto (ekspor barang dan jasa minus impor barang dan

⁶ Zaini Ibrahim, Pengantar Ekonomi Makro. Hal 85-85

jasa). Sisi permintaan agregat di dalam suatu ekonomi bisa digambarkan dalam suatu model ekonomi makro sederhana sebagai berikut.

$$Y = C + I + G + X - M$$

Dimana:

Y = Pendapatan Nasional

C = Konsumsi rumah tangga

I = Investasi sektor swasta

G = Pengeluaran pemerintah

X = Ekspor

M = Impor

4. Faktor Pertumbuhan Ekonomi

Untuk analisis pertumbuhan ekonomi, para ekonomi klasik mengembangkan beberapa faktor yang menjadi penentu pertumbuhan ekonomi. Berikut pembahasan faktor penentu pertumbuhan ekonomi:

a. Barang Modal

Agar ekonomi mengalami pertumbuhan, stok barang modal harus ditambah. Penambahan stok barang modal

dilakukan melalui investasi. Oleh karena itu salah satu upaya dalam meningkatkan investasi adalah dengan mendorong peningkatan faktor-faktor yang memengaruhi jumlah investasi.

b. Tenaga Kerja

Khusus dinegara berkembang, tenaga kerja (TK) masih merupakan faktor produksi yang sangat dominan. Penambahan tenaga kerja umumnya berpengaruh terhadap peningkatan output. Yang menjadi pernyataan adalah berapa banyak penambahan TK akan terus meningkat output. Selama ada sinergi antara TK dan teknologi, penambahan TK akan memacu pertumbuhan Ekonomi.

c. Teknologi

Kemajuan teknologi akan melahirkan *trade off* terhadap kesempatan kerja. Selain itu, kemajuan teknologi makin memperbesar ketimpangan ekonomi antar bangsa, utamanya antara negara maju dengan negara berkembang. Untuk mengatasi ketimpangan antara tenaga kerja dan teknologi, beberapa ekonom mengajukan konsep berupa teknologi tepat guna. Dengan penggunaan teknologi ini, manusia dapat memanfaatkan secara optimal apa yang ada dalam diri dan lingkungannya.

d. Uang

Dalam perekonomian modern, uang memegang peranan dan fungsi sentral. Uang bagi perekonomian ibarat darah dalam tubuh manusia, makin banyak uang yang digunakan dalam proses produksi, makin besar output yang dihasilkan. Tetapi dengan jumlah uang yang sama, dapat dihasilkan output yang lebih besar jika penggunaannya efisien.

e. Manajemen

Manajemen adalah peralatan yang sangat dibutuhkan untuk mengelola perekonomian modern, terutama perekonomian yang sangat mengandalkan mekanisme pasar. Sistem manajemen yang baik, terkadang jauh lebih berguna dibanding barang modal yang banyak, uang yang berlimpah dan teknologi yang tinggi. Ada perekonomian yang tidak terlalu mengandalkan teknologi tinggi namun berkat manajemen yang baik, mampu mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

f. Kewirausahaan

Kewirausahaan secara sederhana didefinisikan sebagai kemampuan dan keberanian mengambil risiko untuk memperoleh

keuntungan. Para wirausahawan/pengusaha harus mempunyai perkiraan yang matang bahwa input yang dikombinasikannya akan menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga timbal baliknya akan memberikan keuntungan yang maksimal bagi perusahaan⁷.

5. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB merupakan indikator pertumbuhan ekonomi yaitu suatu proses kenaikan output nasional suatu periode tertentu terhadap periode sebelumnya. Besaran PDRB dari suatu wilayah terbentuk oleh kombinasi antara total output yang dihasilkan (sisi penawaran agregat) oleh semua sektor ekonomi dan besarnya permintaan (sisi permintaan agregat) di wilayah itu. Tinggi rendahnya output yang bisa dihasilkan oleh semua sektor ekonomi yang ada di wilayah tersebut sangat tergantung pada faktor-faktor produksi yang ada di wilayah tersebut (yang bisa diimpor dari luar wilayah) seperti bahan baku, tenaga kerja, modal, teknologi, energi, dan kewirausahaan.

⁷ Zaini Ibrahim. Pengantar Ekonomi Makro Hal. 81-84

6. Pertumbuhan Ekonomi dalam Islam

Pertumbuhan ekonomi dalam perspektif islam, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, tidak sekadar terkait dengan peningkatan volume barang dan jasa, namun juga terkait dengan aspek moralitas dan kualitas akhlak serta keseimbangan antara tujuan duniawi dan ukhrawi. Ukuran keberhasilan pertumbuhan ekonomi tidak semata-mata dilihat dari sisi pencapaian materi semata, namun juga ditinjau dari sisi perbaikan kehidupan agama, sosial, dan kemasyarakatan. Jika pertumbuhan ekonomi yang terjadi justru memicu tercerabutnya nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan, maka dipastikan pertumbuhan tersebut tidak sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.

Dalam perspektif ekonomi syariah, paling tidak ada tiga faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Ketiganya adalah:

1. *Investible resources* (sumber daya yang dapat diinvestasikan)

Yang dimaksud dengan *investible resources* adalah segala sumber daya yang dapat digunakan untuk menggerakkan roda perekonomian sumber daya tersebut

antara lain sumber daya alam, sumber daya manusia maupun sumber daya modal. Untuk sumber daya alam, maka sumber daya alam yang pada dasarnya merupakan anugerah dari Allah dan telah disiapkan Allah untuk kepentingan manusia dalam melaksanakan tugasnya sebagai khalifahNya di muka bumi, harus dapat dioptimalkan dengan baik dengan tetap menjaga kelestarian dan keseimbangan alam dengan baik. Adapun terkait dengan sumber daya modal, maka potensi dana yang bisa dioptimalkan antara lain adalah *saving rate* di suatu negara. *Saving rate* ini adalah proporsi dana yang disimpan oleh masyarakat dalam bentuk tabungan, yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan ekonomi.

Islam juga memberikan *disinsentif* bagi *idle saving* melalui zakat. Setiap dana yang tidak di produktifkan, maka jumlahnya bisa berkurang karena zakat. Untuk itu, memproduktifkan dana ke sektor riil menjadi salah satu opsi yang paling menguntungkan bagi perekonomian secara keseluruhan, apalagi ditengah negara berkembang yang

memang membutuhkan dana untuk membangun infrastruktur perekonomian negerinya.

2. Sumber daya manusia dan *entrepreneurship*

Ketika basis ekonomi syariah adalah sektor riil, maka memiliki sumber daya manusia *entrepreneurship* yang mampu menggerakkan sektor riil adalah sebuah keniscayaan. Dibandingkan dengan Jepang dan Singapura yang memiliki jumlah *entrepreneur* hingga 10% dan 4% dari jumlah penduduk mereka, Indonesia hingga tahun 2012 menurut kementerian koperasi dan UKM, baru memiliki *entrepreneur* sebanyak 0,18% dari jumlah penduduk. Padahal para *entrepreneur* inilah yang akan menjadi ujung tombak dalam membangun kemandirian ekonomi.

Adapun terkait pengembangan budaya bisnis yang sesuai dengan syariah, ajaran Islam sangat kaya dengan prinsip budaya bisnis syariah. Sebagai contoh adalah hadits Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Baehaqi, dimana beliau bersabda “sesungguhnya sebaik-baik penghasilan ialah penghasilan para pedagang yang mana apabila

berbicara tidak berbohong, apabila diberi amanah tidak khianat, apabila berjanji tidak mengingkarinya. Apabila membeli tidak mencela, apabila menjual tidak berlebihan (dalam menaikkan harga), apabila berhutang tidak menunda-nunda pelunasan dan apabila menagih utang tidak memperberat orang yang sedang kesulitan.” (lihat juga QS. Al-Baqarah: 280).

3. Teknologi dan inovasi.

Technological progress disadari merupakan faktor yang dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Teknologi akan melahirkan efisiensi, dan basis teknologi ini adalah inovasi. Karena itu, inovasi menjadi suatu kebutuhan yang perlu didesain secara serius oleh pemerintah. Islam adalah ajaran agama yang memerintahkan umatnya untuk senantiasa inovatif. Dalam sebuah hadits, Rasulullah Saw. Bersabda : “sesungguhnya Allah menyukai orang mukmin yang berkarya (*al mu'min al muhtarif*)” (HR Baehaqi).

Makna *al mu'min al muhtarif* ini sangat erat kaitannya inovasi, karena setiap karya itu pada dasarnya lahir dari

sebuah inovasi dan kreativitas. Tanpa inovasi dan kreativitas, tidak mungkin akan lahir sebuah karya. Karena itu, pertumbuhan ekonomi dalam islam akan berjalan dengan baik manakala masyarakat memahami kewajibannya untuk menghasilkan karya melalui proses-proses yang kreatif dan inovatif⁸.

B. Dana Alokasi Umum

1. Pengertian Dana Alokasi Umum

Dana alokasi umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum dialokasikan untuk provinsi dan kabupaten/kota.

DAU merupakan *block grant* yang diberikan kepada semua kabupaten dan kota untuk tujuan mengisi kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhan fiskalnya, dan di distribusikan dengan semula berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang secara umum mengindikasikan bahwa daerah miskin dan terbelakang harus

⁸ Irfan Syauqi Beik, Lailly Dwi Arsyianti. Ekonomi Pembangunan Syariah Edisi Revisi. Hal 23-27

menerima lebih banyak daripada daerah kaya. Dengan kata lain tujuan penting alokasi DAU adalah dalam kerangka pemerataan kemampuan penyediaan pelayanan publik antar pemda di Indonesia. UU No. 25/1999 pasal 7 menggariskan bahwa pemerintah pusat berkewajiban menyalurkan paling sedikit 26% dari penerimaan Dalam Negerinya dalam bentuk DAU.

Secara definisi, Dana Alokasi Umum dapat diartikan sebagai berikut:

1. Salah satu komponen dari dana perimbangan pada APBN, yang pengalokasiannya didasarkan atas konsep kesenjangan fiskal atau celah fiskal (*Fiscal Gap*), yaitu selisih antara kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal.
2. Instrumen untuk mengatasi *horizontal imbalance* yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dan penggunaannya di tetapkan sepenuhnya oleh daerah.
3. *Equalization grant*, berfungsi untuk menetralisasi ketimpangan kemampuan keuangan daerah adanya

Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang diperoleh Daerah.

DAU untuk suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah. Alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji pegawai negeri sipil daerah. Jumlah gaji pegawai negeri sipil daerah yang dimaksud adalah gaji pokok ditambah tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan sesuai dengan peraturan penggajian pegawai negeri sipil termasuk didalamnya tunjangan beras dan tunjangan pajak penghasilan (Pph Pasal 21).

Kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum. Layanan dasar publik yang dimaksud antara lain adalah penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan, penyediaan infrastruktur, dan pengentasan masyarakat dari kemiskinan.

Dana Alokasi Umum adalah transfer dana yang bersifat “bock grant” sehingga pemerintah daerah mempunyai keleluasaan

didalam penggunaan DAU sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masing-masing daerah. Pemerintah daerah memiliki keleluasaan untuk menentukan arah penggunaan pendapatan asli daerah (PAD), DBH, dan DAU (*expenditure discretion*).

DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan anatar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. DAU suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal (Fiscal gap) suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (fiscal need) dan potensi daerah (fiscal capa city). Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menegaskan kembali mengenai formula celah fiskal dan penambahan variabel DAU. Alokasi DAU bagi daerah yang potensi fiskalnya besar, tetapi kebutuhan fiskal kecil akan memperoleh alokasi DAU relatif kecil. Sebaliknya, daerah yang potensi fiskalnya kecil, namun kebutuhan fiskal besar, akan memperoleh alokasi DAU relatif besar. Secara implisit, prinsip

tersebut menegaskan fungsi DAU sebagai faktor pemerataan kapasitas fiskal.

2. Penghitungan Dana Alokasi Umum

Jumlah keseluruhan dana alokasi umum ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara). Pendapatan dalam negeri neto adalah penerimaan negara yang berasal dari pajak dan bukan pajak setelah dikurangi dengan penerimaan negara yang dibagi hasilkan kepada daerah.

Jumlah dana alokasi umum 26% ini merupakan jumlah dana alokasi umum untuk seluruh provinsi dan kabupaten/kota. Proporsi dana alokasi umum antara provinsi dan kabupaten/kota dihitung dari perbandingan antara bobot urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota. Dalam hal penentuan proporsi ini belum dapat dihitung secara kuantitatif. Proporsi dana alokasi umum antara dana alokasi umum provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan imbang 10% dan 90%. Jumlah keseluruhan dana alokasi umum ditetapkan dalam APBN setiap tahun dan bersifat final.

Dana alokasi umum untuk suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah. Alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji pegawai negeri sipil daerah. Jumlah gaji pegawai negeri sipil daerah yang dimaksud adalah gaji pokok ditambah tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan sesuai dengan peraturan penggajian pegawai negeri sipil termasuk didalamnya tunjangan beras dan tunjangan pajak penghasilan.

Kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum. Layanan dasar publik yang dimaksud antara lain adalah penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan, penyediaan infrastruktur, dan pengentasan masyarakat dari kemiskinan.

Kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum diukur secara berturut-turut berdasarkan:

- a. Jumlah penduduk

Jumlah penduduk merupakan variabel yang mencerminkan kebutuhan akan penyediaan layanan publik di setiap daerah.

b. Luas wilayah

Luas wilayah merupakan variabel yang mencerminkan kebutuhan atas penyediaan sarana dan prasarana per satuan wilayah. Luas wilayah ini merupakan luas wilayah daratan.

c. Indeks kemahalan konstruksi

Indeks kemahalan konstruksi merupakan cerminan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antar daerah.

d. Produk domestik regional bruto per kapita

Produk domestik regional bruto merupakan cerminan potensi dan aktivitas perekonomian suatu daerah yang dihitung berdasarkan total seluruh output produksi kotor dalam suatu wilayah.

e. Indeks pembangunan manusia

Indeks pembangunan manusia merupakan variabel yang mencerminkan tingkat pencapaian kesejahteraan penduduk atas layanan dasar dibidang pendidikan dan kesehatan.⁹

⁹ Ahmad Yani, Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia. Hal.142-144

C. Dana Alokasi Khusus

1. Pengertian Dana Alokasi Khusus

Dana alokasi khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Dana alokasi khusus merupakan bagian dari dana perimbangan sesuai dengan undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dana alokasi khusus dimaksudkan untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan merupakan prioritas nasional, sesuai dengan fungsi yang merupakan perwujudan tugas pemerintahan dibidang tertentu, khususnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat.

Dana alokasi khusus dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional yang urusan daerah.

Kegiatan khusus tersebut sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dalam APBN. Kegiatan khusus yang ditetapkan oleh pemerintah mengutamakan kegiatan pembangunan dan/atau pengadaan dan/atau peningkatan dan/atau perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang.

Daerah tertentu yang dimaksud adalah daerah yang memenuhi kriteria yang ditetapkan setiap tahun untuk mendapatkan alokasi DAK. Dengan demikian, tidak semua daerah mendapatkan alokasi DAK. Hal yang dimaksud dengan fungsi dalam rincian belanja negara antara lain terdiri atas layanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan, dan perlindungan sosial.

2. Mekanisme Pengalokasian Dana Alokasi Khusus

Daerah tertentu yang dapat memperoleh alokasi DAK ditentukan berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Program yang menjadi prioritas nasional dimuat

dalam rencana kerja pemerintah tahun anggaran bersangkutan. Rencana kerja pemerintah merupakan hasil musyawarah perencanaan pembangunan nasional yang ditetapkan dengan praturan presiden. Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan nasional tersebut diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintah(menteri, gubernur dan bupati/walikota).

Menteri teknis mengusulkan kegiatan khusus yang akan di danai dari DAK dan ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, sesuai dengan rencana kerja pemerintah. Selanjutnya menteri teknis menyampaikan ketetapan tentang kegiatan khusus sebagaimana dimaksud di atas kepada Menteri Keuangan.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai alat bantu dalam memberikan gambaran terkait penelitian yang akan dilakukan. Bantuan yang bisa didapat ialah berupa gambaran tentang bagaimana menyusun kerangka berpikir, bagaimana mengelola

data dan memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui hasil yang telah dijabarkan dalam penelitian terdahulu.

Berikut hasil *review* terhadap penelitian terdahulu:

Tabel 2.1
Penelitian terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Sri Rahayu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2017	Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Cilegon Tahun 2008-2015	Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Cilegon. Hubungan antar variabel dana alokasi umum dan variabel pertumbuhan ekonomi sebesar 0,902 persen
2.	Irmal Suandi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Makasar, 2016	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan	Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah tidak memiliki pengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan tingkat signifikansi sebesar $0,961 > 0,05$ serta nilai koefisien sebesar -

			0,011. Variabel Dana Alokasi Umum tidak memiliki pengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan nilai koefisien sebesar 0,913 dan signifikan pada nilai 0,063 dengan signifikansi 0,05.
3	Nurul Hidayah dan Heri Setiyawati, Universitas Marcu Buana Jakarta. 2014	Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Langsung Di Provinsi Jawa Tengah.	Dari empat hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, terdapat tiga hipotesis yang diterima, dan satu hipotesis yang ditolak. Secara serentak variabel DAU, DAK, dan PAD, berpengaruh dan signifikan terhadap belanja langsung. Secara parsial variabel DAU dan PAD, berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja langsung. DAK berpengaruh negatif terhadap belanja langsung.

4	Ulfi Maryati dan Endrawati, Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Padang. 2010	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus Sumatra Barat.	Hasil pengujian terhadap hipotesis-hipotesis tersebut bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi.
5	Meilen Greeri Paseki, Amran Naukoko, Patrick Wauran, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan, Universitas Sam Ratulangi, Manado. 2014	Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Belanja Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dampaknya Terhadap Kemiskinan Di	Pengaruh variabel Dana Alokasi Umum, Belanja Langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi secara gabung tidak memiliki pengaruh. Pengaruh variabel Dana Alokasi Umum terhadap Kemiskinan secara langsung memiliki

	Kota Manado Tahun 2004 – 2012	pengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan di kota Manado, dan pengaruh belanja langsung terhadap kemiskinan secara langsung memiliki pengaruh signifikan dalam menurunkan tingkat kemiskinan di kota Manado. Dan secara gabungan antara variabel dana alokasi umum, belanja langsung dan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan di yang ada di kota Manado.
--	-------------------------------------	---

E. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban atau dugaan sementara yang harus diuji lagi kebenarannya. Dalam penelitian ini, hipotesis yang digunakan adalah hipotesis asosiatif yang merupakan suatu

pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih.¹⁰ Hipotesis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah:

$H_{O1} = 0$, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara simultan tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten.

$H_{a1} \neq 0$, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara simultan berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten.

$H_{O2} = 0$, Dana Alokasi Umum (DAU) secara parsial tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten.

$H_{a2} \neq 0$, Dana Alokasi Umum (DAU) secara parsial berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten.

¹⁰ Sugiyono, *Statistik untuk penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2009), 89.

$H_{03} = 0$, Dana Alokasi Khusus (DAK) secara parsial tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten.

$H_{a3} \neq 0$, Dana Alokasi Khusus (DAK) secara parsial berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten.